

BAB I

PENDAHULUAN

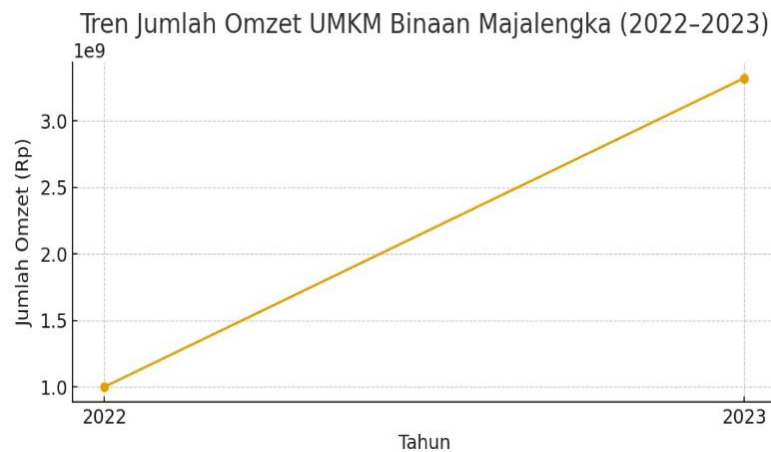
A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yaitu sebesar 97% dari total PDB dan menyerap 60% tenaga kerja nasional. UMKM yang terus berkembang dituntut untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan meningkatkan inovasi agar mampu bersaing di era digital yang sangat kompetitif (Limanseto, 2025).

Kinerja usaha UMKM merupakan salah satu indikator penting yang menggambarkan sejauh mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah mampu mencapai tujuan usahanya baik dari aspek keuangan maupun nonkeuangan. Secara umum, kinerja usaha tidak hanya diukur dari peningkatan omzet, tetapi juga dari pertumbuhan laba, efisiensi operasional, peningkatan modal, perluasan pasar, serta kemampuan bertahan dalam persaingan. UMKM mencakup hasil operasional dan keuangan yang diperoleh dari kegiatan usaha dalam jangka waktu tertentu, seperti pertumbuhan omzet, laba bersih, efisiensi operasional, serta kemampuan bertahan dalam persaingan pasar. Dengan demikian, keberhasilan UMKM tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya pendapatan, melainkan oleh kualitas pengelolaan sumber daya dan strategi bisnis yang diterapkan. (Yuliana et al., 2025).

Khususnya di Kabupaten Majalengka, UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka, 2024). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Majalengka pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp46,30 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,38%, sementara pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi mengalami

sedikit perlambatan menjadi 6,15%. Perlambatan ini mengindikasikan adanya tekanan pada sektor-sektor produktif, termasuk pada sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Dari data (Open Data Majalengka, 2024), jumlah omzet UMKM binaan pemerintah daerah dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut:



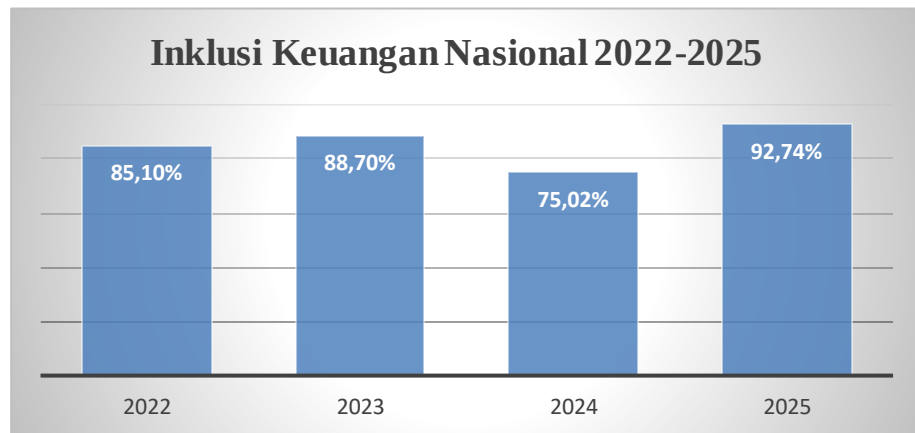
Gambar 1. 1 Jumlah Omzet UMKM Binaan Majalengka
(Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka 2024)

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah omzet UMKM binaan di Kabupaten Majalengka pada tahun 2022 hingga 2023. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka 2024, terlihat bahwa total omzet UMKM mengalami peningkatan signifikan dari Rp1.000.000.000 pada tahun 2022 menjadi Rp3.22.368.000 pada tahun 2023. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan sebesar Rp2.322.368.000 atau sekitar 232,2% dalam satu tahun. Namun demikian, peningkatan omzet tersebut belum sepenuhnya mencerminkan stabilitas kinerja usaha secara menyeluruh. Peningkatan omzet tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba bersih, efisiensi biaya operasional, maupun keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Sebagian pelaku usaha UMKM masih menghadapi kendala dalam pengelolaan arus kas, pencatatan keuangan yang belum sistematis, serta keterbatasan akses pembiayaan formal akibat belum terpenuhinya persyaratan administratif dan jaminan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan omzet belum tentu mencerminkan kualitas kinerja usaha,

sehingga diperlukan analisis lebih mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha.

Salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi kinerja usaha UMKM di Majalengka yang belum optimal yaitu rendahnya literasi dan manajemen keuangan, di mana sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki sistem pencatatan keuangan yang baik, sehingga sulit mengukur laba atau mengakses pembiayaan formal. Terbatasnya akses terhadap modal usaha terjadi karena persyaratan pinjaman perbankan sering kali tidak dapat dipenuhi oleh pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan atau laporan keuangan formal. Minimnya adopsi teknologi digital, baik dalam pemasaran, pembayaran, maupun pencatatan transaksi, mengakibatkan keterlambatan adaptasi terhadap pasar modern, fluktuasi harga bahan baku dan daya beli masyarakat, yang secara langsung memengaruhi margin keuntungan usaha. Kurangnya pendampingan dan pelatihan bisnis berkelanjutan, mengakibatkan perlambatan dalam inovasi produk dan manajemen usaha. Faktor-faktor tersebut sejalan dengan hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Budiasni et al. (2022) yang menemukan bahwa literasi keuangan, perilaku keuangan, dan inklusi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pedagang UMKM.

Adapun faktor yang dapat memengaruhi kinerja usaha, salah satunya adalah inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan keterbukaan penyediaan akses dan penggunaan beragam layanan keuangan yang nyaman dan terjangkau yang mencakup layanan keuangan yang berkelanjutan, relevan, hemat biaya dan bermakna bagi masyarakat yang kurang terlayani secara finansial terutama penduduk pedesaan (Dz, 2018). Tujuannya agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan yang tinggal di daerah terpencil bisa menabung, meminjam, dan bertransaksi, secara aman dan mudah. Adapun data inklusi keuangan nasional dari rentang waktu tahun 2022 sampai 2025 disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 2 Inklusi Keuangan Nasional Tahun 2022-2023
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022–2025), diolah peneliti)

Berdasarkan Gambar 1.2, inklusi keuangan nasional tahun 2022-2025 terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa akses dan penggunaan layanan keuangan formal oleh masyarakat semakin meluas. Peningkatan tersebut juga didukung oleh perkembangan layanan keuangan digital yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi serta mengakses produk keuangan. Secara keseluruhan, kenaikan inklusi keuangan mencerminkan kondisi yang positif dan menjadi faktor pendukung dalam mendorong aktivitas ekonomi, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM.

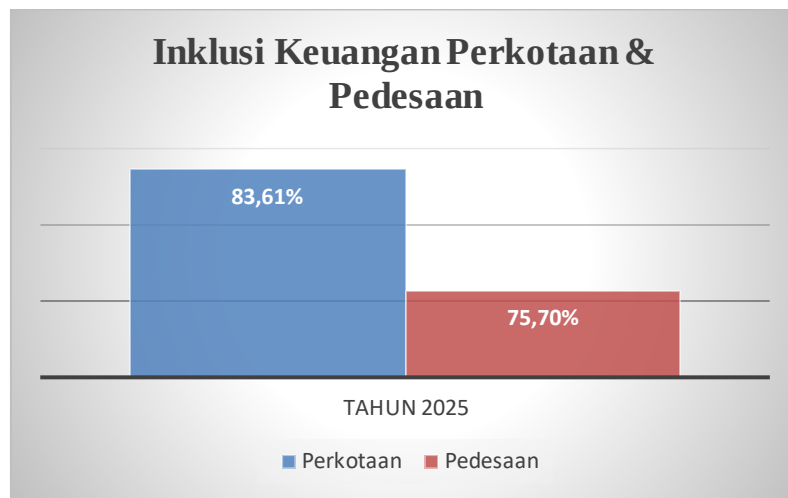
Selain inklusi keuangan nasional, perkembangan inklusi keuangan syariah juga menunjukkan kecenderungan yang positif. Berdasarkan grafik inklusi keuangan syariah, terlihat bahwa tingkat inklusi keuangan syariah mengalami peningkatan dari rentang waktu tahun 2022 sampai 2025 disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 3 Inklusi Keuangan Syariah Tahun 2022–2025
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022–2025), diolah peneliti)

Berdasarkan Gambar 1.3, inklusi keuangan syariah nasional pada periode tahun 2022 hingga 2025, terlihat adanya tren peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan ini menunjukkan bahwa akses dan penggunaan layanan keuangan berbasis syariah oleh masyarakat semakin luas dari tahun ke tahun. Hal tersebut mencerminkan meningkatnya minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Kenaikan inklusi keuangan syariah juga didukung oleh berkembangnya produk dan layanan keuangan syariah, baik melalui perbankan syariah, lembaga keuangan syariah nonbank, maupun layanan keuangan digital syariah. Dengan semakin mudahnya akses terhadap layanan tersebut, inklusi keuangan syariah diharapkan dapat terus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM, secara berkelanjutan.

Meskipun tingkat inklusi keuangan nasional dan inklusi keuangan syariah menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, capaian tersebut belum tentu mencerminkan pemerataan akses layanan keuangan di seluruh wilayah. Untuk melihat perbandingan tingkat inklusi keuangan berdasarkan karakteristik wilayah, berikut disajikan data inklusi keuangan pada wilayah perkotaan dan pedesaan tahun 2025.



Gambar 1. 4 Inklusi Keuangan Perkotaan & Pedesaan Tahun 2025
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025))

Berdasarkan Gambar 1.4, data tahun 2025 yang bersumber dari (OJK, 2025) tingkat inklusi keuangan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 83,61%, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 75,70%. Data tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sebesar 7,91% antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam hal akses dan penggunaan layanan keuangan formal. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat akses, pemanfaatan, serta keterhubungan dengan lembaga keuangan formal yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan infrastruktur keuangan, tingkat pendidikan, akses terhadap teknologi digital, serta kemudahan memperoleh informasi mengenai produk dan layanan keuangan. Sementara itu, masyarakat pedesaan masih menghadapi berbagai keterbatasan yang menyebabkan tingkat inklusi keuangan relatif lebih rendah. Kesenjangan ini menjadi penting untuk diperhatikan karena sebagian besar pelaku UMKM di daerah seperti Kabupaten Majalengka berada di wilayah semiperkotaan dan pedesaan, sehingga perbedaan tingkat inklusi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan mereka dalam mengakses pembiayaan dan mengembangkan usaha.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM. Penelitian Ismail (2015) serta Nadya & Eni (2020) menemukan bahwa akses terhadap layanan keuangan formal meningkatkan kemampuan modal kerja dan ekspansi usaha. Namun, Mahfiroh (2024) menemukan bahwa inklusi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya faktor lain yang mungkin memengaruhi hubungan tersebut. Ketidakkonsistenan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan inklusi keuangan terhadap kinerja usaha masih memerlukan pengujian lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan faktor kontekstual seperti pemanfaatan *financial technology* berbasis syariah.

Selain inklusi keuangan, adapun faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja usaha adalah literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang dalam memahami konsep dan pengelolaan keuangan secara umum, di mana pengetahuan tersebut mencakup hubungan investasi, utang, asuransi, serta instrumen keuangan lainnya (Arianti, 2022). Semakin tinggi tingkat literasi keuangan seseorang, semakin baik pula kemampuannya dalam mengelola keuangan. Pengetahuan keuangan yang baik akan mendorong seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hal menabung, meminjam, berinvestasi, dan mengatur keuangan, sehingga mampu memilih layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhannya (Nugraheni, 2021). Adapun data literasi keuangan nasional dari rentang waktu tahun 2022 sampai 2025 disajikan dalam grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 5 Literasi Keuangan Nasional Tahun 2022–2025

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022–2025), diolah peneliti

Berdasarkan Gambar 1.5, tingkat literasi keuangan nasional pada periode tahun 2022 hingga 2025, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan serta produk dan layanan keuangan formal semakin baik. Kondisi tersebut mencerminkan keberhasilan berbagai program edukasi keuangan dan kemudahan akses informasi keuangan yang semakin luas. Secara keseluruhan, meningkatnya literasi keuangan nasional menjadi faktor penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pengambilan keputusan keuangan yang lebih bijak, khususnya bagi pelaku usaha dan UMKM dalam mengelola dan mengembangkan usahanya

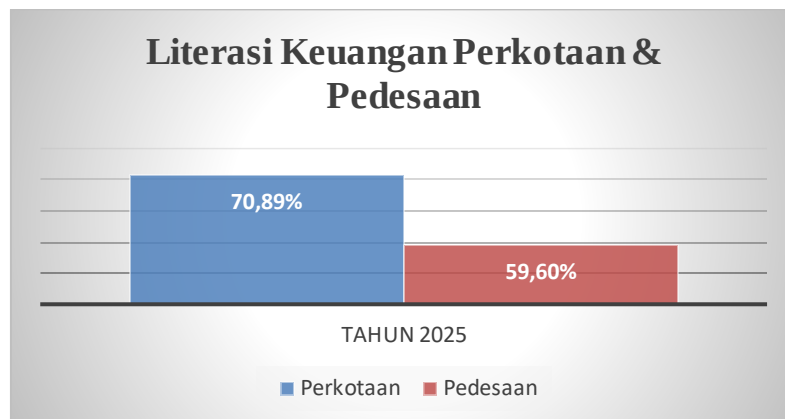
Selain literasi keuangan nasional, perkembangan literasi keuangan syariah juga menunjukkan kecenderungan yang positif. Berdasarkan grafik literasi keuangan syariah, terlihat bahwa tingkat literasi keuangan syariah mengalami peningkatan dari rentang waktu tahun 2022 sampai 2025 disajikan dalam gambar grafik sebagai berikut:



Gambar 1. 6 Literasi Keuangan Syariah Tahun 2022–2025
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2022–2025), diolah peneliti

Berdasarkan Gambar 1.6, tingkat literasi keuangan syariah pada periode tahun 2022 hingga 2025, terlihat adanya tren peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini menunjukkan adanya perkembangan pemahaman masyarakat terhadap konsep, prinsip, serta produk dan layanan keuangan berbasis syariah. Meningkatnya literasi keuangan syariah mencerminkan semakin luasnya pengetahuan masyarakat mengenai sistem keuangan syariah serta meningkatnya kesadaran dalam menggunakan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kondisi ini juga didukung oleh upaya edukasi keuangan syariah dan berkembangnya lembaga serta layanan keuangan syariah. Secara keseluruhan, peningkatan literasi keuangan syariah diharapkan dapat mendorong pemanfaatan layanan keuangan syariah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM.

Meskipun data literasi keuangan nasional dan literasi keuangan syariah menunjukkan adanya peningkatan, distribusinya belum sepenuhnya merata antarwilayah. Perbedaan tersebut terlihat pada tingkat literasi keuangan masyarakat perkotaan dan pedesaan yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 1. 7 Literasi Keuangan Perkotaan & Pedesaan Tahun 2025
(Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2025))

Berdasarkan Gambar 1.7, data tahun 2025 yang bersumber dari (OJK, 2025) tingkat literasi keuangan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 70,89%, sedangkan di wilayah pedesaan sebesar 59,60%. Perbedaan sebesar 11,29% tersebut menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa masyarakat perkotaan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik terkait pengelolaan keuangan, produk perbankan, investasi, serta instrumen keuangan lainnya dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses terhadap informasi keuangan, paparan terhadap layanan perbankan, serta pemanfaatan teknologi digital. Sementara itu, masyarakat pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses informasi dan edukasi keuangan, sehingga tingkat literasi keuangan relatif lebih rendah. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pengambilan keputusan keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM di wilayah semiperkotaan dan pedesaan seperti Kabupaten Majalengka.

Beberapa permasalahan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Majalengka antara lain masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap pencatatan dan pelaporan keuangan usaha, kurangnya perencanaan keuangan yang sistematis, terbatasnya pemahaman terhadap produk pembiayaan formal dan syariah, serta belum optimalnya pemanfaatan

layanan financial technology dalam mendukung kegiatan usaha. Faktor geografis, tingkat pendidikan, serta perbedaan karakteristik sosial ekonomi antarwilayah juga dapat memengaruhi tingkat literasi keuangan di daerah tersebut. Permasalahan inklusi keuangan menjadi penting karena berkaitan erat dengan kinerja usaha, khususnya pada sektor UMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Aribawa (2016) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja UMKM karena pelaku usaha yang memahami pengelolaan keuangan mampu meningkatkan efisiensi dan laba usaha. Hasil serupa juga ditemukan oleh Heliani & Novitasari (2024). Namun demikian, Bene et al. (2024) menemukan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh langsung terhadap kinerja usaha. Perbedaan hasil ini mengindikasikan perlunya variabel lain yang dapat memperkuat hubungan tersebut. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan literasi keuangan terhadap kinerja usaha masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan faktor teknologi keuangan sebagai variabel penguat.

Selain literasi keuangan, adapun faktor lain yang dapat berperan penting dalam kinerja usaha adalah perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah cara seseorang mengelola, mengatur, dan menggunakan sumber daya keuangannya dengan tujuan mencapai tujuan keuangan dan menghindari risiko finansial. Ini mencakup kemampuan merencanakan, menganggarkan, mengendalikan, menyimpan, hingga mengelola dana keuangan sehari-hari, serta bagaimana faktor psikologis seperti bias dan emosi memengaruhi keputusan finansial seseorang (Joshua & Nuryasman, 2021). Dalam konteks usaha, perilaku keuangan yang baik memungkinkan pelaku UMKM mengelola arus kas secara efektif, menjaga stabilitas keuangan, serta meningkatkan kemampuan bertahan dan berkembang. Salah satu faktor yang memengaruhi perilaku keuangan adalah *financial attitude* atau sikap keuangan. *Financial attitude* atau sikap keuangan merupakan suatu perkiraan, gagasan, dan pengetahuan individu tentang keuangan. (Wahyuningsih; et al., 2023) Menyampaikan bahwa Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) mendorong masyarakat agar dapat memiliki sikap keuangan agar tujuan keuangan dapat tercapai dan dapat melakukan perencanaan keuangan. Untuk menciptakan masyarakat yang terwujud melalui suatu perencanaan dan tujuan keuangan, diperlukan adanya dorongan untuk meningkatkan skill dalam perilaku keuangan. Secara empiris, hasil penelitian menunjukkan temuan yang belum konsisten. Zawi M. B. (2024) menemukan bahwa perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Namun, Lasa et al. (2025) menunjukkan bahwa perilaku keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja usaha. Perbedaan temuan ini memperkuat dugaan bahwa diperlukan faktor lain, seperti teknologi keuangan, yang dapat memperkuat hubungan tersebut.

Selain faktor inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan, kinerja usaha fintech adalah pemoderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel. *Financial Technology* (fintech) merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan keuangan. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2023), fintech hadir sebagai bentuk transformasi dari sistem keuangan konvensional menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan inklusif. Dalam konteks ekonomi syariah, fintech berbasis syariah beroperasi dengan prinsip keadilan, keterbukaan, dan menghindari unsur riba, gharar, serta maysir sebagaimana dijelaskan oleh Bank Indonesia (2024). Keberadaan fintech syariah seperti BSI *Mobile*, dompet digital syariah, dan pembiayaan digital berbasis syariah sebenarnya menjadi peluang besar dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Sebagai variabel pemoderasi, fintech berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan terhadap kinerja usaha. Artinya, semakin tinggi pemanfaatan fintech oleh pelaku usaha, semakin kuat pula pengaruh kemampuan literasi, akses keuangan, dan perilaku pengelolaan keuangan

terhadap peningkatan kinerja usaha. Temuan Kamalia et al. (2024) mendukung pandangan ini dengan menunjukkan bahwa penerapan fintech mampu mempercepat proses transaksi, meningkatkan aksesibilitas layanan, serta mengoptimalkan pemberian pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, yang secara konseptual juga dapat meningkatkan efisiensi layanan keuangan bagi pelaku usaha di daerah.

Di Majalengka, perkembangan fintech masih menghadapi sejumlah kendala. Berdasarkan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Majalengka (2023), tingkat literasi keuangan dan literasi digital masyarakat masih relatif rendah dibandingkan dengan rata-rata Jawa Barat. Banyak pelaku usaha kecil belum familier dengan teknologi pembayaran digital dan belum mempercayai sistem keuangan berbasis daring seperti QRIS. Padahal perkembangan fintech sebenarnya berpotensi memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional bank. Akan tetapi, di Majalengka, pemanfaatan fintech berbasis syariah seperti *BSI Mobile*, dompet digital syariah, maupun platform pembiayaan digital masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami cara penggunaannya karena keterbatasan literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem online. Akibatnya, potensi fintech untuk memperkuat kinerja usaha belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini menyebabkan banyak pelaku usaha masih bergantung pada transaksi tunai dan akses ke lembaga keuangan konvensional yang terbatas, sehingga efisiensi dan produktivitas usaha menjadi rendah.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya keterkaitan antara literasi, inklusi, serta teknologi keuangan dengan kinerja usaha perbankan syariah. Penelitian oleh Mahfiroh (2024) menunjukkan bahwa inklusi keuangan berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM dan perbankan syariah melalui peningkatan DPK dan penyaluran pembiayaan. Namun demikian, Hilmawati & Kusumaningtias (2021) menunjukkan bahwa peningkatan akses keuangan tidak selalu berdampak pada peningkatan kinerja UMKM apabila tidak disertai dengan pemahaman pengelolaan dana. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan akses

keuangan saja belum cukup untuk mendorong kinerja usaha tanpa adanya dukungan kemampuan pengelolaan yang memadai.

Temuan serupa juga terjadi pada variabel literasi keuangan. Aribawa (2016) menemukan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dan keberlangsungan UMKM, yang menunjukkan bahwa kemampuan pelaku usaha dalam memahami dan mengelola keuangan mampu meningkatkan efektivitas operasional dan profitabilitas usaha. Namun, hasil yang ditunjukkan oleh Bene et al. (2024) menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UMKM. Meskipun literasi berpengaruh pada perilaku pengelolaan keuangan, perilaku itu sendiri juga tidak meningkatkan kinerja. Jadi, literasi keuangan yang tinggi tidak otomatis meningkatkan kinerja jika tidak diikuti oleh kemampuan mengimplementasikannya dalam pengelolaan usaha.

Hasil penelitian oleh Zawi M. B. (2024) menemukan bahwa perilaku keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM, yang menunjukkan bahwa pelaku usaha dengan kebiasaan pengelolaan keuangan yang baik mampu mencapai kinerja yang lebih optimal. Sebaliknya, penelitian Lasa et al. (2025) menunjukkan bahwa perilaku keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor praktis, seperti keterbatasan kemampuan pengelolaan keuangan, fokus pada operasional harian, dan keterbatasan modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku keuangan belum tentu cukup kuat memengaruhi kinerja usaha secara langsung tanpa dukungan sistem dan teknologi yang memadai.

Penelitian Astari & Candraningrat (2022) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi finansial (fintech) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Selain itu, tingkat literasi keuangan yang lebih tinggi pada pelaku UMKM mendorong penggunaan fintech secara lebih efektif, sehingga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan secara optimal. Namun, penelitian Ulpah et al. (2024) di

Sukabumi menunjukkan bahwa *fintech* tidak berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan usaha UMKM dan variabel literasi keuangan tidak memoderasi hubungan tersebut. Ketidakkonsistenan hasil penelitian ini menunjukkan adanya research gap terkait peran *fintech* dalam memperkuat hubungan antara inklusi keuangan, literasi keuangan, perilaku keuangan, dan kinerja usaha.

Dengan mempertimbangkan latar belakang bahwa Majalengka merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat, penelitian ini berangkat dari pertimbangan bahwa lembaga keuangan syariah di wilayah tersebut memiliki peran penting dalam memperluas jangkauan layanan keuangan berbasis syariah di kawasan perkotaan. Meskipun memiliki potensi besar, kinerja usaha di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat terhadap produk keuangan syariah, perilaku keuangan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian, serta pemanfaatan layanan *fintech* yang belum optimal akibat keterbatasan pemahaman dan kepercayaan terhadap teknologi digital. Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah di Majalengka belum berjalan secara maksimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas operasional dan kinerja usaha.

Berdasarkan research gap yang telah diuraikan, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada pengujian peran *fintech* sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan terhadap kinerja usaha UMKM dalam konteks daerah, khususnya di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menganalisis pengaruh langsung antarvariabel atau menggunakan data pada tingkat nasional. Dalam penelitian ini, teknologi keuangan syariah diintegrasikan sebagai faktor yang memperkuat hubungan antara inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan terhadap kinerja usaha UMKM. Pendekatan tersebut digunakan untuk membantu menjelaskan perbedaan

hasil temuan pada penelitian terdahulu sekaligus mengisi keterbatasan data pada tingkat daerah mengenai perkembangan inklusi keuangan. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual berbasis daerah serta menempatkan peran digitalisasi keuangan syariah dalam menjelaskan kinerja usaha UMKM.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **‘Pengaruh Inklusi Keuangan, Literasi Keuangan, dan Perilaku Keuangan terhadap Kinerja Usaha dengan Fintech sebagai Pemoderasi: Studi pada Pelaku Usaha di Majalengka’**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat kesenjangan akses keuangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Layanan lembaga keuangan syariah seperti bank dan koperasi masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan kesulitan menjangkau layanan tersebut. Hal ini menghambat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan formal dan berdampak pada rendahnya kinerja usaha UMKM di wilayah pedesaan.
2. Meskipun tingkat inklusi keuangan secara nasional mengalami peningkatan, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan akses dan pemanfaatan layanan keuangan di tingkat daerah, khususnya pada pelaku usaha di Majalengka. Sebagian pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses pembiayaan formal akibat persyaratan administratif dan jaminan yang sulit dipenuhi. Selain itu, pemanfaatan produk dan layanan keuangan seperti kredit usaha, asuransi, maupun layanan pembayaran digital belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses keuangan yang tersedia belum tentu dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja usaha.
3. Literasi keuangan pelaku usaha juga masih menjadi permasalahan. Sebagian pelaku usaha belum memiliki kemampuan yang memadai

dalam melakukan pencatatan keuangan, menyusun laporan sederhana, serta merencanakan keuangan usaha secara sistematis. Keterbatasan pemahaman mengenai pengelolaan arus kas, risiko pembiayaan, dan perencanaan keuangan jangka panjang berpotensi menghambat peningkatan kinerja usaha. Selain itu, perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha menunjukkan adanya inkonsistensi yang perlu diuji kembali secara empiris.

4. tingkat literasi keuangan nasional dan literasi keuangan syariah mengalami peningkatan pada periode 2022–2025, kondisi tersebut belum tentu mencerminkan tingkat literasi keuangan pelaku usaha di Kabupaten Majalengka. Keterbatasan data daerah menyebabkan belum diketahui secara pasti tingkat pemahaman pelaku usaha dalam pengelolaan keuangan, termasuk perencanaan, pengelolaan arus kas, pemanfaatan produk keuangan, serta layanan keuangan syariah. Rendahnya literasi keuangan diduga berdampak pada kurang optimalnya pengambilan keputusan keuangan dan pemanfaatan financial technology, sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas operasional dan kinerja usaha UMKM.
5. Perilaku keuangan masyarakat belum mendukung kinerja usaha yang dilaksanakan. Rendahnya literasi keuangan juga berdampak pada perilaku keuangan masyarakat. Sebagian besar masyarakat masih memiliki kebiasaan mengelola keuangan secara tidak terencana dan belum berorientasi pada prinsip syariah. Hal ini membuat masyarakat lebih memilih produk keuangan konvensional yang dianggap lebih mudah dan praktis. Perilaku keuangan seperti ini berdampak pada rendahnya loyalitas nasabah terhadap produk perbankan syariah dan kurangnya partisipasi dalam pembiayaan berbasis syariah.
6. Pemanfaatan fintech syariah seperti qris masih terbatas. Perkembangan fintech sebenarnya berpotensi memperluas akses keuangan dan meningkatkan efisiensi operasional bank. Namun, di

Majalengka, pemanfaatan fintech berbasis syariah seperti *BSI Mobile*, dompet digital syariah, maupun platform pembiayaan digital masih rendah. Banyak masyarakat belum memahami cara penggunaannya karena keterbatasan literasi digital dan kepercayaan terhadap sistem online. Akibatnya, potensi fintech untuk memperkuat kinerja usaha sepenuhnya terealisasi.

C. Pembatasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang merupakan pengguna aktif layanan keuangan syariah di Kabupaten Majalengka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tiga variabel independen, yaitu inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan, terhadap kinerja usaha. Sebagai variabel dependen, financial technology (fintech) berperan sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada keterkaitan antarvariabel yang telah ditetapkan, sehingga faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi makro, kebijakan pemerintah, serta aspek sosial dan budaya yang berpotensi memengaruhi kinerja usaha tidak dianalisis lebih lanjut agar penelitian tetap terfokus dan terarah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka?
2. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka?
3. Apakah perilaku keuangan berpengaruh terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka?
4. Apakah fintech dapat memoderasi pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka?

5. Apakah fintech dapat memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka?
6. Apakah fintech dapat memoderasi pengaruh perilaku keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perilaku keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka.
- d. Untuk mengetahui dan menganalisis peran fintech sebagai pemoderasi pada pengaruh inklusi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka.
- e. Untuk mengetahui dan menganalisis peran fintech sebagai pemoderasi pada pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka.
- f. Untuk mengetahui dan menganalisis peran fintech sebagai pemoderasi pada pengaruh perilaku keuangan terhadap kinerja usaha UMKM di Majalengka.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat serta kontribusi yang luas bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai pengaruh inklusi keuangan, literasi keuangan, dan perilaku keuangan terhadap kinerja

bank syariah, dengan menambahkan perspektif fintech sebagai variabel moderasi.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perbankan Syariah :

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam perumusan strategi pengembangan layanan keuangan digital berbasis syariah yang lebih efektif dan selaras dengan kebutuhan pelaku usaha, khususnya dalam mendukung peningkatan kinerja UMKM.

2) Bagi Peneliti:

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji keterkaitan antara literasi keuangan, inklusi keuangan, perilaku keuangan, fintech, dan kinerja usaha pada perbankan syariah di berbagai wilayah maupun konteks yang berbeda.

3) Bagi Pelaku Usaha (UMKM) :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai pentingnya akses keuangan, pengetahuan keuangan, dan perilaku keuangan yang baik, serta pemanfaatan fintech syariah secara optimal untuk meningkatkan kinerja usaha.

F. Sistematika Penelitian

Agar pembaca dapat dengan mudah memahami uraian penelitian secara sistematis, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, bab pendahuluan menyajikan penjelasan gambaran keseluruhan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, meliputi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, perumusan masalah serta tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, pada bab kajian pustaka terkandung informasi terkait penjabaran teori serta tinjauan atas penelitian terdahulu

sebagai dasar dan landasan pendamping bagi peneliti dalam merumuskan hipotesis penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini berisikan informasi terkait pendekatan yang dilakukan dalam penelitian meliputi populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian berkaitan dengan pendekatan untuk menjawab hipotesis penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ke-empat berisikan penjelasan berkaitan dengan hasil yang didapat dari pengolahan data penelitian dengan menggunakan metode yang dirumuskan dalam metodologi penelitian.

BAB V PENUTUP, dalam bab penutup berisi rangkuman-rangkuman dari hasil yang diperoleh berdasarkan rangkaian penelitian disertai dengan saran terkait penelitian yang dilakukan.

